

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan dua pendekatan yaitu melalui pengurangan dan penanganan.¹ Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir².

Secara geografis Kabupaten Melawi terletak pada posisi 0°07'11''-1°21'58''LS dan 111°07'03''- 112°27'38'' BT dengan luas wilayah 10.640,80km²sekitar 82,85% (8.818,70 km²) dari luas seluruh wilayahnya merupakan perbukitan. Secara administratif Kabupaten Melawi terdiri dari 11 Kecamatan, 169 Desa dan 603 Dusun. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi terdiri dari Kecamatan Belimbing, Belimbing Hulu, Ella Hilir, Menukung, Nanga Pinoh, Sayan, Sokan, Tanah Pinoh, Pinoh Selatan, Tanah

¹ Rahmadi, Takdir, 2019, Hukum Lingkungan Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 165.

² Mulasari, S. A. (2012). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di dusun padukuhan desa sidokarto kecamatan godean kabupaten sleman yogyakarta. Jurnal Kesmas volume 6 nomor 3: 204-211

Pinoh Barat, dan Pinoh Utara.³ Permasalahan sampah ini menjadi focus Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Melawi.

Permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Melawi yaitu kekurangannya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Melawi sehingga menyebabkan sampah yang ada di TPA tersebut menumpuk dan hanya sebatas menjadi tempat para pemulung untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang sebagian besar sampah-sampah anorganik, sedangkan sampah organik seperti sisa sayur dan sebagainya dibiarkan menumpuk di TPA. Persoalan yang tampak ialah dalam bentuk kongkret banyaknya sampah yang dihasilkan oleh kehidupan warga sehari-hari. Kadar dengan kuantitas sampah tersebut dipengaruhi oleh sebagian faktor, antara lain faktor jumlah penduduk yang bertambah pesat, status sosial ekonomi warga, dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).⁴ Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”⁵

Pengelolaan sampah yang masih menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup adalah salah satu usaha alternatif untuk mengelola lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat memberi manfaat lain, tetapi tingkat partisipasi

³ PPID Kabupaten Melawi, 2020, Profil Daerah Kabupaten Melawi, <https://ppid.melawikab.go.id/statis-26-profil-daerah.html> , di akses 17 November 2022

⁴ Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67.

⁵ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, diakses pada tanggal 17 November 2022.

warga masyarakat desa maupun kota dalam mengelola sampah secara mandiri masih tergolong kategori sedang hingga rendah. Pengelolaan sampah ini jika dilakukan secara bijak oleh warga masyarakat dapat memiliki nilai jual yang tinggi serta diharapkan menjadi budaya yang baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah ini harus berdasarkan pada aturan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengelolaan sampah tersebut terutama bagi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dibidang kebersihan dan lingkungan hidup serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi memegang peran yang strategis dalam Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Melawi.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten Melawi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Melawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Melawi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam upaya pengelolaan sampah di Melawi.

b. Bagi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sehingga dapat memberikan jaminan pengelolaan sampah yang lebih baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Melawi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pemikiran kepada masyarakat agar dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar agar dapat menerapkan prinsip 3R di dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi Penulis

Untuk penulis adalah sebagai syarat kelulusan dalam Starata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten Melawi” merupakan penelitian dan karya asli dari penulis sendiri, bukan dari plagiasi ataupun duplikasi dari penulis hukum karya orang lain. Oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3 skripsi yang menjadi bahan pertimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Penulisan skripsi oleh Monika Febrian Pardosi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2014.

1) Judul Skripsi

Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

2) Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

3) Hasil Penelitian

- a. Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan maksimal. Pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan hanya mencakup dua (2) kecamatan, sedangkan pengelolaan sampah di lima belas (15) kecamatan lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. Selain itu, beberapa program kerja di tingkat TPA juga tidak berjalan. Namun untuk dua (2) kecamatan, Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan sudah cukup baik, dengan menggunakan sistem pengumpulan

sampah dengan teknik operasional dan sistem controlled landfill dalam pemrosesan akhir di TPA.

- b. Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, yaitu luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, kurangnya petugas kebersihan, kurangnya armada pengangkut sampah, kurangnya anggaran dana yang diberikan Pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah dan manfaat dari sampah, serta penegakan hukum yang kurang tegas dalam pemberian sanksi.

2. Penulisan Skripsi oleh Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2021.

1) Judul Skripsi

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan DI Boyolali.

2) Rumusan Masalah

- a) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

- b) Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

3) Hasil Penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Adapun hambatan-hambatan dan solusi belum maksimalnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran warga Pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan.
- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- c) Kurangnya sarana prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah.
- d) Belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum nantinya dibuang ke TPA.

- e) Pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat kampung di sekitar permukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali.

Berdasarkan kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali.

3. Arief Sunu Wicaksono, 160512441, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020.

1) Judul Skripsi

Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Klaten.

2) Rumusan Masalah

- a) Bagaimana peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?
- b) Apa kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?

3) Hasil Penelitian

- a. Kelompok Swadaya Masyarakat "Ngudi Rapi" adalah penggerak utama yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, serta sebagai induk Bank Sampah karena Kelompok Swadaya Masyarakat lain yang berada di wilayah Kabupaten Klaten yang bergerak dibidang pengelolaan sampah merupakan binaan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) " Ngudi Rapi ". Upaya yang dilakukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) " Ngudi Rapi " sebagai upaya pencegahan pencemaran antara lain dengan cara mengedukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dalam membuang sampah, mengurangi presentase jumlah sampah melalui daur ulang dan diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang besar, sehingga hasil tersebut dapat di perjual belikan dan memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakatnya.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat "Ngudi Rapi" yang pertama adalah belum mampu untuk mengolah sendiri sampah anorganik khususnya seperti sampah plastik karena lahan yang kurang, serta belum mempunyai mesin dan alat yang memadai. Kemudian yang kedua kurangnya kedisiplinan dari masyarakat tentang kegiatan pemilahan sampah yang merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari oleh masyarakat, masyarakat saat ini masih menjadikan satu sampah tersebut. Apabila sejak dari rumah

tangga masyarakat telah melakukan pemilahan sampah dapat meringankan pekerjaan Kelompok Swadaya Masyarakat sehingga bisa melakukan kegiatan pengolahan sampah secara maksimal.

Ketiga tulisan tersebut memiliki pembeda dengan penelitian penulis. Tulisan pertama, membahas Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tulisan kedua membahas Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan DI Boyolali Beserta dengan apa hambatan dan solusinya.

Tulisan ketiga membahas mengenai peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten, ketiga tulisan tersebut mempunyai persamaan yaitu mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah serta apa hambatannya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan upaya penegakan hukum di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Melawi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peran

Peran (*role*) merupakan perspektif dinamis dari posisi (*status*). Kalau seseorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan posisinya, itu berarti bahwa dengan begitu ia melangsungkan suatu peran.⁶

2. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Melawi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Melawi, Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, serta mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.⁷

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁸

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

⁷Peraturan Bupati Melawi No 46 Tahun 2017 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Melawi, di akses pada 24 Maret 2023

⁸Undang-undang Nomor 18 Pasal 1 Angka 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di akses pada 24 Maret 2023

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama).⁹

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik itu bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁰

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm. 28.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 101.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan sampah Di Kabupaten Melawi.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara, teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.¹¹
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukannya melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 75.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Melawi

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah : Ibu Rima Paramita, S.Km MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, dan Bapak Deni Jatika, S.H., selaku Ketua Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

6. Analisis Data

Analisis Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.